

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil bahan dan data yang sudah penulis kumpulkan dan analisa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari permasalahan seputar tindak pidana bagi pembakar hutan dan lahan dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu:

1. Sudah nampak dengan nyata bahwa akibat pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh berbagai kalangan baik individu dan korporasi benar-benar telah membuat hutan di negeri ini menyusut dengan sangat cepat. Kerusakan tersebut berdampak terhadap ketidak seimbangan alam dan ekosistem yang ada. Berakibat pada kepunahan hayati, longsor dan bencana banjir. Ancaman terhadap keselamatan harta benda dan jiwa manusia. Tak terhitung kerugian materil akibat dari bencana yang terjadi. Taksedikit manusia terancam penyakit yang mematikan bahkan korban nyawa manusia pun sudah terjadi.
2. *Ihya al-Mawaat* yang terdapat dalam konsep kepemilikan lahan dalam islam menatur bagaimana mengelola dan mengolah lahan yang terbiar dan mati. Hutan yang dikuasai negara tidaklah termasuk pada kategori yang menjadi target dari *ihya al-mawaat*. Islam mengatur batasan kepemilikan lahan pada tataran kesanggupan pengelolaan, bukan pada hasrat dan keinginan manusia yang tak terbatas dalam menguasai lahan secara pribadi.
3. Kemaslahatan ummat dalam pemeliharaan lingkungan hidup merupakan skala prioritas guna menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan

hidup manusia. Kewajiban pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) dipandang sebagai bagian dari *maqâshid al-syarî'ah*, di samping memelihara agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mâl*). Sebab jika pemeliharaan lingkungan tidak dapat diwujudkan secara nyata maka pemeliharaan harta dan jiwapun takan terwujud.

4. Pentingnya melahirkan konstruksi hukum Islam tentang pelaku pembakaran hutan dan lahan yang telah menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi kehidupan manusia. Harmonisitas alam dan manusia terganggu. Sehingga terciptalah kondisi yang saling menyakiti antara alam dan manusia. Hubungan simbiosis mutualisme dari keduanya menjadi tidak harmonis. Untuk itu pembakaran hutan dengan sengaja atau tidak dalam hal ini dapat dijatuhi hukum takzir yang besar hukumannya berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang ada. Bahkan pelaku dapat di minta untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang mereka buat tersebut. Penetapan ganti rugi dengan menggunakan azaz keadilan. Tentunya target utama dari penetapan hukuman ini adalah untuk menimbulkan sifat jera bagi pelaku dan bagi orang yang akan berniat melakukan hal yang sama. Perlindungan hak dari korban perbuatan tersebut pun akan ada dengan diberlakukannya hukum diyat atau daman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

Setelah mengadakan penelitian dan membuat kesimpulan sebagaimana di atas, peneliti membuat dan memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Kemampuan menggunakan kaidah-kaidah *ushūliyyah* perlu dilatih dalam praktik pemecahan masalah hukum Islam *kontemporer* dalam forum-forum khusus, seperti *bahtsul masāil*, *Majlis Tarjih* dan *laboratorium hukum* yang perlu didirikan di Fakultas maupun Jurusan Syari'ah pada lingkup Perguruan Tinggi Islam.
2. Kajian *ushūl fiqh* perlu lebih digalakkan dilembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam agar dapat menghasilkan mufti-mufti yang berkualitas.
3. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, hal ini sangat disadari karena keterbatasan penulis, maka oleh sebab itu dimohon kritikan dan saran positif untuk kesempurnaannya.

Pekanbaru, 15 Februari 2018



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.